

KAJIAN SUBSISTEM PRODUKSI DAN PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

Study of Production and Marketing Subsystem in Private Forest Development

Andy Risasmoko¹, Hardjanto, dan Leti Sundawati

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB

¹email: andy_risasmoko@yahoo.co.id

ABSTRACT

Private forest has benefit of economic, ecology, and social. Private forest development need to be conducted continuously to gain the optimal benefit. In developing of private forest need to understanding of private forest management system, i.e. production and marketing subsystem. This research was conducted in Glontor Village and Tlogosari Village, Kebumen District by purposive sampling method within 60 farmers as respondent. The objectives of this research are to analyze the production and marketing subsystem of private forest. Data collected by observation, interview, and literature study. Result of research showed that production subsystem: private property land, private forest development more conducted in mountainous area, most of cropping are agroforestry and mixed planting, plant maintenance have not been conducted intensively. Marketing subsystem: the middleman played a major role in the marketing of timber, purchasing on standing stock, and farmer as price taker.

Key words: *marketing subsystem, private forest development, production subsystem*

PENDAHULUAN

Hutan rakyat memiliki manfaat ekologi, ekonomi dan sosial. Mahendra (2009) menyatakan hutan rakyat dengan pola tanam agroforestri (wanatani) memiliki pengaruh terhadap aspek ekologi yang signifikan. Tanaman pohon akan memiliki peranan terhadap peningkatan kesuburan tanah, mengurangi laju erosi (Andayani 2003; Sudiana *et al.* 2009). Hutan rakyat dengan pola agroforestri memberikan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek dan pendapatan jangka panjang sebagai tabungan (Kusumedi dan Jariyah 2010). Selain itu, hutan rakyat memiliki manfaat ekonomi, yaitu berperan dalam meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah (Dirgantara 2008; Irawanti *et al.* 2012). Pendapatan dari hutan rakyat adalah pendapatan tambahan dengan kisaran tidak lebih dari 10% dari total pendapatan petani (Hardjanto 2000; Darusman dan Hardjanto 2006). Manfaat lain dari hutan rakyat, yaitu manfaat sosial. Manfaat sosial yang dapat dilihat dari kegiatan hutan rakyat secara langsung adalah terbukanya lapangan pekerjaan (Djajapertjunda 2003; Sudiana *et al.* 2009).

Salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan hutan rakyat adalah Kabupaten Kebumen yang memiliki luas wilayah 128 111.50 ha dengan kondisi wilayah berupa daerah dataran rendah dan pegunungan. Pada tahun 2010 tercatat 88 343.50 ha merupakan lahan kering dan 39 768 ha lahan sawah. Penggunaan lahan kering (bukan sawah) dibagi menjadi lahan untuk pertanian seluas 42 799.50 ha dan bukan untuk pertanian 45 544 ha (Pembukab Kebumen 2012). Lahan kering tersebut dapat berupa tegalan, ladang, perkebunan, hutan rakyat dan padang penggembalaan. Luas hutan rakyat di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 seluas 18 250 ha (Dishutbun Kabupaten Kebumen

2014).

Pengembangan hutan rakyat perlu terus dilakukan untuk memperoleh manfaat yang optimal. Akan tetapi, dalam pengembangan hutan rakyat perlu memahami sistem pengelolaan hutan rakyat yang meliputi subsystem produksi, pemasaran, pengolahan dan kelembagaan. Apabila sistem pengelolaan hutan rakyat masih ada subsystem yang lemah, maka subsystem ini akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha hutan rakyat. Penelitian ini menganalisis subsystem produksi dan pemasaran yang merupakan mata rantai dari sistem pengelolaan hutan rakyat. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran pengelolaan hutan rakyat yang berjalan saat ini khususnya subsystem produksi dan pemasaran untuk mengoptimalkan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Kebumen.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: (1) Subsystem produksi dan (2) Subsystem pemasaran pada pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kebumen.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu Januari sampai dengan Maret 2015. Penelitian dilakukan di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam yang berada di bagian Utara Kabupaten Kebumen dan di Desa Tlogosari, Kecamatan Ayah di bagian Selatan Kabupaten Kebumen.

Teknik Penarikan Contoh

Pertama menentukan secara sengaja kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang memiliki luas hutan rakyat paling luas di bagian Utara, yaitu Kecamatan Karanggayam dan bagian Selatan, yaitu Kecamatan

Ayah. Tahap kedua memilih secara acak masing-masing satu desa dan Kelompok Tani Hutan (KTH) di bagian Utara dan Selatan pada kecamatan yang terpilih. Tahap ketiga memilih secara acak responden petani hutan rakyat pada desa atau Kelompok Tani Hutan (KTH) di desa tersebut. Menurut Singarimbun dan Sufian (1995) dalam penelitian survei standar minimal responden yang diambil sebanyak 30 orang. Oleh karena itu, jumlah responden masing-masing desa adalah 30 orang sehingga total responden 60 orang.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

1. Pengamatan, yaitu data dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan melalui observasi.
2. Wawancara terstruktur, yaitu tatap muka langsung dengan responden untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan kuisioner.
3. Studi literatur, yaitu mencari pustaka, laporan dan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada 60 orang petani hutan rakyat. Data sekunder diperoleh dari dinas kehutanan, BPS, kantor kecamatan dan desa setempat serta instansi lain yang terkait.

Analisis Data

1. Analisis subsistem produksi

Analisis kualitatif untuk menggambarkan variabel-variabel pada subsistem produksi, yaitu kepemilikan lahan, luas hutan rakyat, potensi tegakan, pola tanam dan pemeliharaan tanaman.

2. Analisis subsistem pemasaran

Pada subsistem pemasaran analisis kualitatif untuk menggambarkan pola pemasaran, rantai pemasaran, struktur pasar dan perilaku pasar. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis margin pemasaran dan margin keuntungan dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Tomeck dan Robinson (1990), yaitu:

$$MP = Pr - Pf \text{ atau } MP = \sum bi + \sum ki$$

Keterangan:

MP : Margin pemasaran

Pr : Harga di tingkat konsumen

Pf : Harga di tingkat produsen

bi : Biaya pada tiap lembaga pemasaran

ki : Keuntungan pada tiap lembaga pemasaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Biofisik

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128 111.50 ha. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan:

Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

Kabupaten Kebumen memiliki kondisi topografi yang bervariasi, bagian Selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian Utara berupa pegunungan (BPS Kabupaten Kebumen 2013).

Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas tanah alluvial, latosol, podsolik, regosol, glei humus, alluvial kelabu dan mediteran coklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen pada sebagian wilayahnya tergolong cukup subur.

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sekitar 128 111.50 ha. Luas lahan kering 88 343.50 ha (68.96%) sedangkan luas sawah 39 768 ha (31.04%). Penggunaan lahan kering (bukan sawah) dibagi menjadi untuk lahan pertanian sebesar 42 799.50 ha (48.45%) dan bukan untuk pertanian sebesar 45 544.00 ha (51.55%). Lahan kering untuk penggunaan lain berupa perkebunan, tegalan, padang penggembalaan dan bangunan. Tabel 1 menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1 Penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen

No.	Penggunaan lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Hutan negara	16 861.00	13.16
2.	Hutan rakyat	18 249.63	14.25
3.	Penggunaan lain	53 232.87	41.55
4.	Sawah	39 768.00	31.04
Jumlah		128 111.50	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2013)

Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 didominasi oleh sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB mencapai 34.26%. Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 tumbuh sebesar 5.47%. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan 3.67%. Sektor kehutanan tumbuh 0.75% disumbang oleh peningkatan produksi tanaman kehutanan berupa kayu jati (8.86%) pada tahun 2012. Peningkatan produksi tanaman kehutanan berasal dari peningkatan produksi kayu rakyat dan peningkatan permintaan kayu jati bulat dari konsumen (BPS Kabupaten Kebumen 2013).

Kondisi Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Hutan Rakyat

Umur

Umur responden sebagian besar lebih dari 40 tahun. Seluruh responden berada pada usia produktif yaitu, 15–64 tahun. Hal ini menunjukkan usaha hutan rakyat mampu menjadi usaha untuk pemberdayaan masyarakat dan menyerap usia produktif untuk bekerja. Selain itu, usaha hutan rakyat masih menjadi usaha rumah tangga sehingga pengelolaannya juga melibatkan seluruh anggota keluarga.

Pekerjaan

Pekerjaan utama masyarakat di pedesaan sebagian besar sebagai petani. Jumlah responden yang memiliki pekerjaan petani di Desa Glontor sekitar 73.3% dan di Desa Tlogosari sekitar 60%. Sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan utama sebagai petani namun tidak menjadikan usaha hutan rakyat sebagai pekerjaan utama. Hal tersebut karena usaha hutan rakyat memerlukan jangka waktu yang lama untuk memperoleh pendapatan dari usaha tersebut. Masyarakat memilih usaha hutan rakyat sebagai pekerjaan sampingan karena usaha hutan rakyat mudah dilakukan, tidak membutuhkan usaha yang intensif dan tidak membutuhkan banyak waktu.

Pendidikan

Umumnya pendidikan masyarakat pedesaan sampai dengan pendidikan SMA. Pendidikan responden di Desa Glontor sebagian besar lulus SMP (46.7%) sedangkan di Desa Tlogosari sebagian besar lulus SMA (40%). Tabel 2 memperlihatkan tingkat pendidikan responden.

Tabel 2 Pendidikan formal responden

Tingkat Pendidikan	Desa Glontor		Desa Tlogosari	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
Tidak lulus	0	0.0	0	0.0
SD	10	33.3	8	26.7
SD	14	46.7	10	33.3
SMP	6	20.0	12	40.0
SMA	0	0.0	0	0.0
Lebih dari SMA				
Jumlah	30	100.0	30	100.0

Pendidikan Informal

Pendidikan informal mengenai hutan rakyat yang diikuti oleh petani berupa pelatihan-pelatihan dan studi banding. Akan tetapi, sebagian besar responden belum pernah mengikuti pelatihan terkait hutan rakyat. Pelatihan cenderung diikuti oleh pengurus KTH. Responden yang pernah mengikuti pelatihan berkaitan dengan hutan rakyat di Desa Glontor (16.7%) sedangkan di Desa Tlogosari (23.3%).

Subsystem Produksi

Kepemilikan lahan

Status kepemilikan lahan merupakan faktor penting bagi petani untuk menentukan bentuk penggunaan lahan. Usaha hutan rakyat memerlukan lahan sebagai modal usaha. Lahan berupa hak milik atau milik sendiri merupakan kekuatan utama petani hutan rakyat untuk tetap mengusahakan hutan rakyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 100% responden sebagai pemilik lahan.

Suprpto (2010) menyatakan keputusan penggunaan lahan tersebut bergantung kepada pemilik lahan. Lahan tersebut tetap akan dipertahankan sebagai hutan rakyat atau akan dipergunakan untuk peruntukan lain. Di beberapa tempat lahan yang semula diperuntukkan sebagai hutan rakyat dialihkan peruntukannya untuk membangun rumah, pembangunan infrastruktur dan sarana umum lainnya.

Luas hutan rakyat

Luas hutan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 adalah 18 250 ha (Dishutbun Kabupaten Kebumen 2014). Secara umum sebaran hutan rakyat lebih dominan di wilayah Kabupaten Kebumen bagian Utara. Wilayah ini berupa daerah pegunungan yang memiliki tanah marjinal sehingga kurang produktif untuk komoditi pangan. Kecamatan Karanggayam merupakan wilayah yang memiliki hutan rakyat paling luas (2 090 ha). Wilayah di bagian Selatan Kabupaten Kebumen berbeda dengan wilayah di bagian Utara. Bagian Utara memiliki karakteristik lahan yang lebih subur dan memiliki topografi relatif datar sehingga petani memilih untuk menanam komoditi pangan. Oleh karena itu, hanya beberapa wilayah di bagian Selatan yang memiliki hutan rakyat yang luas. Kecamatan Ayah merupakan kecamatan yang memiliki hutan rakyat paling luas (1 345 ha).

Hutan rakyat di lokasi penelitian, yaitu di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam dan di Desa Tlogosari Kecamatan Ayah rata-rata luasan hutan rakyat yang dimiliki petani relatif sempit. Hardjanto (2000) menyatakan hutan rakyat di Jawa pada umumnya luasannya sempit, hanya sedikit yang memenuhi definisi hutan dengan luas minimal 0.25 ha. Hal tersebut karena rata-rata kepemilikan lahan di Jawa sangat sempit. Luas hutan rakyat responden di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Luas hutan rakyat milik responden

No.	Luas hutan rakyat (ha)	Persentase (%)
1	0.10–1.23	85
2	1.24–2.37	10
3	2.38–3.50	5
	Jumlah	100

Potensi Tegakan

Jenis pohon yang dominan ditanam di lokasi penelitian adalah jati dan sengon. Desa Glontor memiliki potensi pohon jati yang lebih besar daripada Desa Tlogosari karena pohon jati dominan ditanam petani di Desa Glontor. Sedangkan potensi pohon sengon lebih tinggi di Desa Tlogosari karena masyarakat di Desa Tlogosari lebih menyukai mengembangkan jenis pohon sengon daripada jati. Tabel 4 menunjukkan potensi hutan rakyat yang dimiliki responden di lokasi penelitian.

Tabel 4 Potensi hutan rakyat yang dimiliki responden di lokasi penelitian

	Potensi pohon perkelas diameter (m ³ /ha)		
	<20 cm	20–30 cm	>30 cm
Desa Glontor			
Sengon	23.44	34.34	21.02
Jati	24.73	41.21	34.62
Desa Tlogosari			
Sengon	51.58	48.08	42.04
Jati	18.55	30.91	17.31

Pola Tanam

Pola tanam hutan rakyat umumnya pola campuran dan agroforestri (tumpangsari). Pola tanam campuran merupakan kombinasi dari berbagai jenis pohon, sedangkan pola agroforestri mengkombinasikan pohon dengan tanaman pertanian. Pola tanam di Desa Glontor sebagian besar dengan pola agroforestri (66.7%) sedangkan di Desa Tlogosari lebih banyak pola tanam campuran (46.7%). Sedangkan pola tanam monokultur hanya diterapkan oleh beberapa petani. Jarak tanam pola monokultur 3 x 3m, 5 x 5m. Tabel 5 menunjukkan pola tanam hutan rakyat di Desa Glontor dan Desa Tlogosari.

Tabel 5 Pola tanam hutan rakyat

Pola tanam	Desa Glontor		Desa Tlogosari	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
Monokultur	5	16.7	8	26.7
Campuran	5	16.7	14	46.7
Agroforestri	20	66.7	8	26.7
Jumlah	30	100.0	30	100.0

Struktur tegakan pola campuran terdiri dari berbagai jenis dan umur. Jarak tanam hutan rakyat pola campuran tidak teratur. Jenis pohon yang ditanam di lokasi penelitian antara lain: jati, sengon, dan pohon buah-buahan. Hutan rakyat pola agroforestri merupakan kombinasi pohon dengan tanaman pertanian. Tanaman pertanian yang ditanam antara lain: singkong, jagung, kacang tanah dan pisang. Sistem agroforestri diterapkan pada saat kondisi tegakan masih terbuka sehingga cahaya matahari masih dapat masuk. Tanaman pertanian umumnya diusahakan pada saat pohon masih berumur 1 tahun sampai 3 tahun. Setelah umur 3 tahun tajuk pohon sudah berkembang sehingga akan menghalangi cahaya masuk ke dalam hutan sehingga perkembangan tanaman pertanian kurang baik. Menurut Mustari (2000) keuntungan pola tanam agroforestri memperoleh hasil tanaman pertanian dalam jangka pendek.

Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan berupa kegiatan pemupukan, pembersihan gulma, dan pemangkasan cabang. Tujuan utama kegiatan pemupukan dan pembersihan gulma adalah pemeliharaan terhadap tanaman pertanian. Seluruh

responden di Desa Glontor dan Desa Tlogosari melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu awal musim penghujan dan akhir musim penghujan. Pupuk yang digunakan berupa pupuk kandang dengan dosis ± 3 kg per pohon. Pembersihan gulma atau semak dilakukan setahun 2 kali. Selain itu, pada tanaman jati dilakukan kegiatan pemangkasan cabang setahun sekali.

Kegiatan pemeliharaan umumnya dilakukan sampai umur pohon 3 tahun. Setelah umur pohon 3 tahun tidak dilakukan pemupukan dan penyiangan karena tajuk pohon sudah menaungi permukaan tanah sehingga gulma dan semak belukar tidak dapat tumbuh. Hasil penelitian Mustari (2000) petani hutan rakyat umumnya melakukan pemupukan di lahan hutan rakyat adalah untuk memupuk tanaman pertanian yang ada di bawah pohon dan kegiatan pemeliharaan dilakukan sampai umur pohon 3 tahun.

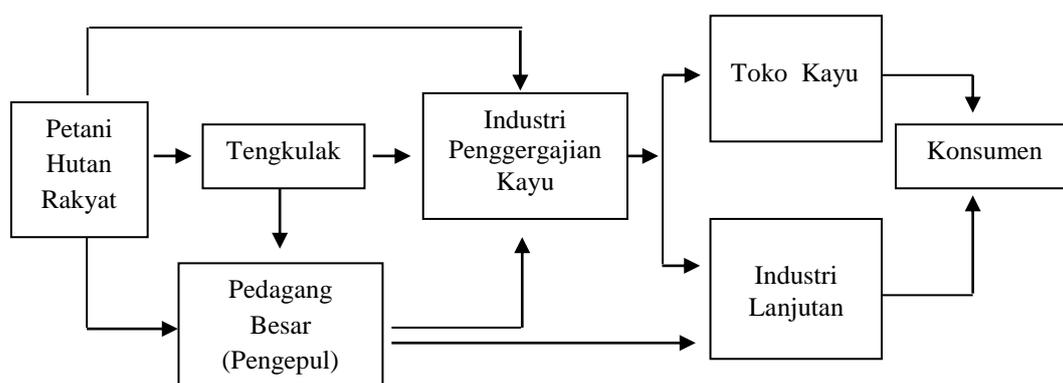
Subsistem Pemasaran

Pola Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran

Petani hutan rakyat lebih menyukai menjual kayu dalam bentuk pohon berdiri. Pembeli pohon atau pedagang pengumpul akan mendatangi pemilik hutan rakyat. Selanjutnya melihat keadaan pohon dan jumlah pohon yang dimiliki petani. Pembeli menentukan harga secara borongan atau membeli secara individu pohon berdasarkan diameter pohon.

Hasil studi terhadap cara pemasaran kayu rakyat, baik di Desa Glontor maupun Desa Tlogosari sebagian besar responden memilih memasarkan kayu rakyat melalui tengkulak. Menurut petani cara penjualan ini dilakukan oleh sebagian besar petani hutan rakyat hal ini dilakukan karena lebih mudah dan praktis. Petani tidak perlu mengeluarkan biaya penebangan dan pengangkutan. Petani akan langsung menerima uang tunai dari pembeli sesuai dengan jumlah pohon dan kondisi tegakan yang dimiliki oleh petani.

Pola pemasaran kayu rakyat yang paling banyak ditemukan di lokasi penelitian adalah penjualan kayu melalui tengkulak. Selanjutnya kayu dari tengkulak dijual ke pedagang besar (pengepul) atau ke industri penggergajian kayu. Gambar 1 menunjukkan pola pemasaran kayu rakyat di lokasi penelitian.



Gambar 1 Pola pemasaran kayu rakyat

Achmad *et al.* (2008) menyatakan pola pemasaran seperti ini sebagian besar kayu beredar di tengkulak sehingga peranan tengkulak sangat besar untuk kelangsungan tata niaga kayu rakyat. Meskipun pola pemasaran ini memposisikan petani memperoleh keuntungan paling kecil. Tengkulak dapat berperan besar dalam pemasaran kayu rakyat karena tengkulak menguasai informasi pasar. Tengkulak memiliki taktik dan strategi yang baik untuk memperoleh bahan baku maupun dalam menjual kayu ke pedagang besar atau industri pengolahan kayu. Menurut Efendi (2008) sistem pemasaran atau tata niaga kayu rakyat cenderung merugikan petani, terlalu menguntungkan pedagang karena: (a) penjualan dalam bentuk tegakan (borongan) sehingga keuntungan rendah. (b) penjualan dalam bentuk kayu bulat ke luar daerah, nilai tambah bagi masyarakat rendah.

Responden memilih cara penjualan kayu dengan sistem tebang pilih. Hal ini dipilih karena diameter pohon yang beragam. Petani akan menjual pohon yang memiliki diameter pohon relatif besar dan

meninggalkan pohon dengan diameter kecil sebagai tabungan yang akan datang. Sedangkan cara lain adalah pembeli akan menebang habis seluruh pohon yang ada di hamparan lahan tersebut. Petani yang melakukan cara ini umumnya petani yang memiliki hutan rakyat dengan pola tanam monokultur. Tabel 6 memperlihatkan cara panen oleh petani hutan rakyat di Desa Glontor dan Desa Tlogosari.

Tabel 6 Cara panen oleh petani hutan rakyat

Cara Panen	Desa Glontor		Desa Tlogosari	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
Tebang pilih	28	93.3	23	76.7
Tebang habis	2	6.7	7	23.3
Jumlah	30	100.0	30	100.0

Analisis margin, harga dan biaya pemasaran kayu sengon dan jati di Kabupaten Kebumen disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Analisis margin pemasaran dan keuntungan kayu sengon dan jati di Kabupaten Kebumen

Uraian	Sengon		Jati		Keterangan
	Harga (Rp/m ³)		Harga (Rp/m ³)		
Petani	250 000		750 000		Kayu A2 (diameter 20-29 cm) harga per pohon Rp 150 000 (sengon); Rp 300 000 (jati)
Tengkulak					
Biaya:	105 000		105 000		
- tebang dan potong	15 000		15 000		Harian Rp 150 000/hari/10 m ³
- sarad	20 000		20 000		Borongan Rp 20 000/m ³
- muat/bongkar	20 000		20 000		Per truk Rp 100 000/5 m ³
- transportasi	50 000		50 000		Truk Rp 250 000/5 m ³ (dalam kabupaten)
Harga jual	450 000		1 000 000		
Margin pemasaran	200 000		250 000		
Margin keuntungan	95 000		145 000		
Pedagang Besar					
Biaya:	125 000		330 000		
- muat/bongkar	20 000		20 000		
- transportasi	100 000		300 000		Truk Rp 1 500 000/5 m ³ (pengiriman ke Jepara)
- pungutan	5 000		10 000		Pungutan liar di jalan
Harga jual	600 000		1 500 000		
Margin pemasaran	150 000		500 000		
Margin keuntungan	25 000		170 000		
Industri Penggajian					
Harga beli	500 000				
Biaya:	275 000				
- penggajian (tenaga+bahan bakar)	150 000				
- muat/bongkar	20 000				
- transportasi	100 000				
- pungutan	5 000				
Harga jual	900 000				
Margin pemasaran	400 000				
Margin keuntungan	125 000				

Keterangan:

Diolah dari data primer dengan responden petani hutan rakyat 10 orang, tengkulak 5 orang, pedagang besar 2 orang dan pemilik industri penggajian kayu 5 orang.

Rantai Pemasaran

Pada rantai pemasaran kayu, hal yang dikaji, yaitu peredaran kayu rakyat dari tengkulak ke pihak berikutnya. Ada 7 tengkulak yang dijadikan responden, yaitu 3 orang di Desa Glontor dan 4 orang di Desa Tlogosari.

Peredaran kayu rakyat sebegini besar dari petani hutan rakyat melalui tengkulak. Selanjutnya dari tengkulak rantai pemasarannya ke industri penggergajian kayu di dalam desa maupun luar desa dalam kecamatan. Selain itu dapat juga dari tengkulak ke pedagang besar di dalam kecamatan maupun luar kecamatan. Kayu dari pedagang besar dapat dijual lagi ke luar kecamatan ke industri penggergajian kayu atau ke luar kabupaten ke industri lanjutan (industri *furniture* di Jepara). Rantai pemasaran kayu dari tengkulak ke pihak berikutnya di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Rantai pemasaran kayu rakyat dari tengkulak

Wilayah Pemasaran	Jumlah tengkulak (orang)	%
Luar kabupaten	2	28.6
Dalam kabupaten	2	28.6
Dalam kecamatan	2	28.6
Dalam desa	1	14.3
Jumlah	7	100.0

Struktur Pasar

Struktur pasar kayu rakyat berkaitan dengan jumlah pembeli, sifat produk, dan hambatan berusaha. Karakteristik organisasi pasar yang berpengaruh terhadap sifat kompetisi dan pembentukan harga di pasar. Unsur-unsur struktur pasar kayu rakyat dapat dibedakan dalam empat ciri, yaitu tingkat konsentrasi penjual, tingkat konsentrasi pembeli, sifat kekhasan produk dan hambatan berusaha (Hardjanto 2003).

Hasil penelitian bahwa responden menyatakan penentuan harga awal kayu ditentukan oleh pembeli. Selanjutnya proses transaksi dan tawar menawar harga kayu terjadi antara petani dan pedagang kayu. Namun pedagang memiliki posisi tawar yang lebih baik karena mengetahui informasi dan harga pasar. Petani cenderung menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang kayu karena keterbatasan pengetahuan. Sedangkan petani terkadang hanya bersikap menerima karena seringkali terdesak oleh kebutuhan.

Para petani hutan rakyat juga melakukan penjualan kayu secara bebas dan bersifat individu, tidak ada kerja sama baik dengan KTH maupun dengan pedagang kayu. Petani menjual kayu sesuai dengan kebutuhan ekonomi masing-masing.

Menurut Hardjanto (2003) tidak ada kerja sama dan informasi pasar pada level petani hutan rakyat menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga petani cenderung hanya sebagai pengambil harga (*price taker*). Dengan demikian tidak terjadi konsentrasi penjual pada pasar pohon berdiri.

Selain itu, masalah lainnya adalah nilai konversi kayu antara petani dan pedagang. Achmad (2008) menyatakan pedagang kayu dalam menentukan harga sesuai dengan diameter pohon. Akan tetapi, prakteknya diameter yang diukur cenderung *underestimate*

sehingga petani cenderung dirugikan. Selanjutnya pedagang menjual kayunya dengan dasar volume. Pengalaman yang dimiliki pedagang kayu dalam memprediksi volume pohon dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan atas kelemahan petani.

Jumlah tengkulak yang sering membeli kayu di Desa Glontor sekitar 3 orang sedangkan di Desa Tlogosari sekitar 5 orang. Berdasarkan wawancara dengan pedagang kayu, bahwa mereka dalam melakukan kegiatannya bebas membeli kayu dari siapa dan dari wilayah mana saja. Pedagang kayu mencari dan mendatangi petani hutan rakyat. Para pedagang kayu bekerja sendiri-sendiri, tidak melakukan kerja sama dengan pihak lain. Hardjanto (2003) menyatakan kondisi pasar pohon berdiri tidak terjadi konsentration pembeli karena sebenarnya setiap pedagang memiliki "wilayah" pasar tertentu yang dikuasainya. Wilayah seperti ini umumnya terbentuk karena ada hubungan kekerabatan maupun kedekatan dengan tempat tinggal pedagang dan pemilik hutan rakyat.

Jenis pohon yang dominan ditanam di wilayah penelitian adalah jati dan sengon. Kondisi lingkungan relatif sama baik dari tempat tumbuh maupun kebiasaan masyarakat. Produk yang dihasilkan juga relatif seragam, tidak ada diferensiasi produk. Menurut Hardjanto (2003) kondisi seperti ini menunjukkan bahwa petani hutan rakyat tidak memiliki pola perilaku dan keragaan pasar yang berbeda.

Hambatan berusaha kayu rakyat tidak ada karena usaha kayu rakyat terbuka bagi siapa saja yang menginginkannya. Hardjanto (2003) menyatakan sumber penyebab hambatan berusaha antara lain adanya keuntungan suatu perusahaan akibat diferensiasi produk, tingkat superioritas petani dibandingkan petani lain akibat perbedaan pemilikan lahan. Hasil wawancara dengan responden hampir seluruh hutan rakyat yang dimiliki adalah lahan milik sendiri. Hal ini berkaitan dengan keputusan petani untuk menentukan usaha atau pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Wilayah penelitian Desa Glontor memiliki tanah marginal yang kurang subur sehingga kurang produktif untuk tanaman pertanian. Kondisi seperti ini menjadi kesempatan bagi para petani untuk menanam pohon dan mengembangkan hutan rakyat di wilayah tersebut. Dengan demikian hutan rakyat akan memberikan manfaat baik secara ekonomi, ekologi dan sosial.

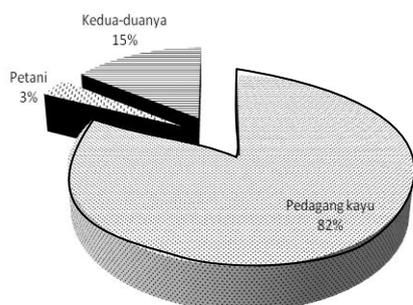
Menurut Hardjanto (2003) dengan kondisi seperti ini bahwa struktur pasar pohon berdiri berupa pasar monopsoni lokal. Distribusi manfaat pasar monopsoni cenderung kepada pembeli (pedagang kayu) sebagai monopsonis. Para petani tidak memiliki kemampuan untuk merubah pasar karena tidak ada kerja sama dengan petani lain khususnya dalam pemasaran kayu rakyat. Hasil wawancara dengan pengurus KTH Sidodadi dan KTH Tlogo Mulyo bahwa kelompok yang ada belum mampu membantu anggota KTH dalam proses penjualan atau pemasaran kayu. KTH yang ada hanya membantu dalam proses produksi hutan rakyat atau hanya untuk menerima proyek-proyek pemerintah.

Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah pola perilaku yang dianut dalam adaptasi atau penyesuaian terhadap keadaan pasar.

Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga pemasaran dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktek transaksi (Hardjanto 2003). Perilaku pasar kayu rakyat merupakan pola kebiasaan yang meliputi proses pengambilan keputusan oleh penjual (petani hutan rakyat) dengan pembeli (pedagang kayu) terhadap produk kayu rakyat selama periode tertentu.

Hasil wawancara dengan responden ada 2 kemungkinan dalam transaksi jual beli kayu rakyat. Pertama, pedagang kayu mencari kayu dan melihat tegakan pohon yang sudah besar (diameter > 20 cm) atau sesuai dengan permintaan pedagang besar (pengepul). Selanjutnya pedagang menemui pemilik pohon dan mulai menawarkan harga kayu kepada pemilik pohon. Apabila pemilik pohon atau petani hutan rakyat cocok dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli (pedagang kayu) maka akan terjadi kesepakatan jual beli. Kedua, petani hutan rakyat menawarkan pohon yang dimiliki kepada pedagang kayu. Hal ini umumnya terjadi karena petani memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selanjutnya pedagang kayu melihat dan memperkirakan volume pohon berdiri yang akan dijual. Setelah menaksir volume pohon berdiri kemudian menawarkan harga kayu kepada pemilik pohon. Pada kondisi ini, biasanya petani berada pada pihak yang lemah sehingga harga kayu sangat ditentukan oleh pedagang kayu. Gambar 2 menunjukkan persentase antara penjual (petani hutan rakyat) dengan pembeli (pedagang kayu) dalam pengambilan keputusan dalam penentuan harga kayu rakyat.



Gambar 2 Persentase penentuan harga kayu rakyat

Ada responden yang menyatakan dalam pengambilan keputusan harga pohon mereka yang menentukan. Namun hanya 3% yang mengemukakan seperti itu. Meskipun pedagang kayu sudah sering menawar pohon yang dimiliki tetapi responden belum mau menjual pohon yang dimiliki sesuai dengan harga yang diminta responden. Karakteristik petani hutan rakyat seperti ini jarang ditemukan. Petani hutan rakyat seperti ini karena memiliki pekerjaan utama lain dan secara ekonomi memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Hasil wawancara dengan responden kesepakatan harga pohon yang wajar (15%) antara petani hutan rakyat dan pedagang kayu umumnya terjadi karena pedagang kayu yang mencari kayu ke petani hutan rakyat. Proses transaksi seperti ini menempatkan petani pada posisi tawar yang lebih baik. Petani menjual pohon

bukan karena kebutuhan yang mendesak tetapi menjual pohon karena ada permintaan dari pedagang kayu. Selain itu, ada hubungan kekerabatan dan saling mengenal antara petani dengan pedagang kayu. Hubungan sosial yang baik ikut menentukan harga kayu. Pedagang cenderung tidak menekan harga kayu kepada petani tetapi proses transaksi dan tawar menawar berjalan dengan baik.

Pedagang kayu memiliki peran sangat besar dalam penentuan harga kayu rakyat (82%). Hal ini terjadi karena pedagang kayu memiliki informasi pasar dan jaringan pemasaran yang baik. Petani kurang mengetahui informasi pasar dan cenderung menjual kayu pada saat ada kebutuhan ekonomi yang besar atau kebutuhan mendesak. Hardjanto (2000) mengemukakan petani hutan rakyat melihat pohon sebagai "tabungan" yang pada saat diperlukan dapat ditebang dan dijual. Atas dasar kebiasaan petani hutan rakyat dalam menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maka dikenal istilah "tebang butuh". Kebutuhan tersebut antara lain biaya anak sekolah, biaya hajatan dan sebagainya.

Oleh karena itu perilaku pasar tidak selamanya konstan. Perilaku pasar akan berubah sesuai dengan pelaku pasarnya di masa yang akan datang. Perilaku pasar sangat dipengaruhi oleh informasi yang beredar di lapangan. Hardjanto (2003) mengemukakan perilaku pasar kayu rakyat yang umum terjadi perilaku pedagang kayu sebagai monopsonis lokal. Untuk menjaga monopsoninya maka pedagang kayu seminimal mungkin untuk menjaga informasi pasar sehingga tidak diketahui oleh petani hutan rakyat.

SIMPULAN

1. Substistem produksi: sebagian besar lahan hutan rakyat milik sendiri, pengembangan hutan rakyat lebih banyak di wilayah Utara Kabupaten Kebumen yang merupakan daerah pegunungan, pola tanam yang diterapkan oleh petani sebagian besar pola agroforestri dan campuran serta kegiatan pemeliharaan tanaman belum dilakukan secara intensif.
2. Substistem pemasaran: tengkulak berperan sangat besar dalam pemasaran kayu, hampir semua petani menjual kayunya melalui tengkulak, cara pembelian kayu secara borongan atau per individu pohon dengan kondisi pohon berdiri dan petani cenderung sebagai pengambil harga (*price taker*). Khusus kayu jati, wilayah pemasarannya sampai ke luar kabupaten dan dikirim dalam bentuk gelondongan.

SARAN

Saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan hutan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen adalah:

1. Pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memberikan pelatihan, pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam hal pemanenan, pengolahan dan pemasaran kayu.

2. Penyuluh Kehutanan perlu selalu memberikan bimbingan dan informasi kepada para petani mengenai pemasaran kayu rakyat dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan hutan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad B, Handayani W, Diniyati D, Fauziyah E, Hani A, Widyaningsih TS, Herawati T. 2008. *Hutan Rakyat Jawa Barat Status Riset dan Strategi Pengembangannya*. Ciamis (ID): Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.
- Andayani. 2003. Strategi peningkatan efisiensi usaha perhutanan rakyat. *Jurnal Hutan Rakyat* 5(1): 17–29.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2013. *Kebumen dalam Angka*. Kebumen (ID): BPS Kabupaten Kebumen.
- Darusman D, Hardjanto. 2006. Tinjauan ekonomi hutan rakyat. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Hlm 4–13
- Dirgantara U. 2008. Analisis potensi fisik, sosial dan ekonomi untuk pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi [tesis]. Bogor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- [Dishutbun Kabupaten Kebumen] Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 2014. Laporan Tahunan Dishutbun Kabupaten Kebumen. Kebumen: Dishutbun Kabupaten Kebumen.
- Djajapertjunda S. 2003. *Mengembangkan Hutan Milik di Jawa*. Cetakan I. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Efendi R. 2008. Kajian Tataniaga Kayu Rakyat di Jawa Bagian Barat. Prosiding Hasil-hasil Penelitian Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Hardjanto. 2000. Beberapa ciri pengusahaan hutan rakyat di Jawa. Di dalam: Suharjo (penyunting). *Hutan rakyat di Jawa perannya dalam perekonomian desa*. Bogor (ID): Program Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3KM). PP 7–11.
- Hardjanto. 2003. Keragaan dan pengembangan usaha kayu rakyat di Pulau Jawa. [Disertasi]. Bogor (ID): Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Irawanti S, Suka AP, Ekawati S. 2012. Manfaat ekonomi dan peluang pengembangan hutan rakyat sengon di Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 9(3): 126–139.
- Kusumedi P, Jariyah NA. 2010. Analisis finansial pengelolaan agroforestri dengan pola sengon kapulaga di Desa Tirip. Kecamatan Wadaslintang. Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 7(2): 93–100.
- Mahendra F. 2009. *Sistem Agroforstri dan Aplikasinya*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustari T. 2000. Hutan rakyat sengon: daur dan kelestarian hasil. Di dalam: Suharjo (penyunting). *Hutan rakyat di Jawa perannya dalam perekonomian desa*. Bogor (ID): Program Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3KM). PP 85–106.
- [Pemekab Kebumen] Pemerintah Kabupaten Kebumen. 2012. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen. [Internet]. [diunduh 2014 Juni 3]. Tersedia pada: <http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>
- Singarimbun M, Sufian E. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta(ID): LP3S.
- Sudiana E, Hanani N, Yanuwadi B, Soemarno. 2009. Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. *Agritek* 17(3): 543–555.
- Suprpto E. 2010. Membangun Unit Manajemen Hutan Rakyat Menuju Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari. Materi Pelatihan. Blora 21–22 Juli 2010.
- Tomek WE, Robinson KL. 1990. *Agricultural Product Prices. Second edition*. Ithaca: Cornell University Press.